

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abd. Wahab Wajo, 2005, *Kelahiran Notaris Pembuat Akta Koperasi-Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Mengkerdikan Wewenang Notaris (Peningkaran terhadap AD dan Kode Etik INI sendiri)*, Renvoi
- Adib Bahari, 2010, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifina Chaniago, 1987, Cet. 6, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Dasman Djamaluddin, 2012, *Notaris ke Indonesia*, Nomor 1.109, Renvoi, edisi Juni, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, “*Hukum Perusahaan*”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.
- I.G Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Bekasi.
- Indro Harto, 2005, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beberapa pengertian dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Refomasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2011, *Eksistensi Badan Hukum di Indonesia sebagai wadah dalam Menunjang Kehidupan Manusia*, Law Review Volume XI No. 1 – Juli.
- Khudzaifah Dinyanti dan Kelik Wardiyanto, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- L.Boedi Wahyono Suyud Morgono,2001, *Hukum Yayasan antara Fungsi Karitatif atau Komersial*, Novindo Putra Mandiri, Jakarta.
- Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Didalam Perkembangan*, TPK Gunung Mulya, Yogyakarta.
- Nini Wiyanti dan Y.W. Sunindhia, 2003, Cet. 4, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Nur Basuku Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta.
- Muchtar Kusumat Madja dan Arief B. Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*, Buku I, Alumni, Bandung.
- Muhammad Hasbi, 2018, *Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kaitannya Dengan Kontrak Konstruksi Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya, Bakti, Bandung.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta.
- Reski Fitria Razak, 2018, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Di Wilayah Sumatera Barat*, Tesis Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang.
- Rony Hanitijo Soemitro, 2004, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti,1987, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Inter Masa, Jakarta.

Sudikno Mortokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Alam Pustaka, Yogyakarta.

Suharmisi Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian*, cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Tobing G.H.S Luban, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Yuskar, 2015, *Sistem Ekonomi Rakyat Menuju Indonesia Makmur dan Bermartabat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013, terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

## **C. Sumber Lain**

<https://keuangan.kontan.co.id/news/baru-21-notaris-akta-koperasi-daftar-sisminbhkop>

<http://poskotanews.com/2016/02/11/notaris-jadi-faktor-penentu-kualitas-koperasi/>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180326114947-92-285913/ukm-izin-koperasi-beralih-ke-kemenkumham-mulai-april>

[https://sisminbhkop.id/downloads/Panduan\\_untuk\\_Notaris\\_dan\\_Dinas.pdf](https://sisminbhkop.id/downloads/Panduan_untuk_Notaris_dan_Dinas.pdf), Panduan Untuk Notaris Dan Dinas